



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DEWI APRIDA
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 735205

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **2.765.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.410 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SUNGAI PENUH, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA SUNGAI PENUH, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA SUNGAI PENUH, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA SUNGAI PENUH, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
5. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA KOTA SUNGAI PENUH, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **189.900.000**

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000



5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
23.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 90.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.059.900.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.059.900.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.